



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8744-8752

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Politik Identitas Terhadap Pemilu (Studi Kasus Di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung)

Pebriana Asina Panjaitan^{1✉}, Jihan Aisyah Ramadhania², Risky Sakti LumbanGaol³, Daniel David Sidebang⁴, Julia Ivanna⁵

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara

Email: pebrianapanjaitan8@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perilaku politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Perilaku politik identitas juga dapat memperkuat solidaritas dan identitas kelompok, membuat pemilih merasa terhubung dan mewakili nilai-nilai, kepentingan, atau aspirasi mereka yang dapat menciptakan rasa keterikatan dalam kelompok identitas tertentu dan mendorong prinsip demokrasi terhadap perilaku politik identitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan mencari referensi lain yang relevan dari internet. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang. Adapun Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung sudah memahami dengan jelas akan politik identitas dalam pemilu, masyarakat setempat menganggap bahwa politik identitas sudah dinggap sebagai salah satu upaya yang efektif oleh masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada para calon kandidat yang akan dipilih.

Kata Kunci : *Politik Identitas, Pemilihan Umum, Masyarakat, Pemerintahan*

Abstract

Identity political behavior is a political tool of a group such as ethnicity, tribe, culture, religion or others for certain purposes as a form of resistance or as a tool to show the identity of that group. Identity political behavior can also strengthen group solidarity and identity, make voters feel connected and represent their values, interests or aspirations which can create a sense of attachment within a particular identity group and encourage democratic principles towards identity political behavior. This research uses research methods Qualitative, data collection techniques are carried out by observation,

interviews, and searching for other relevant references on the internet. Sample used in this research totaling 3 people. The results of this research show that the people of Jalan Sering, Sidorejo Subdistrict, Medan Tembung have a clear understanding of identity politics in elections. The local people consider that identity politics is considered an effective effort by the community to be able to give full trust to the candidates. candidate to be selected.

Keywords : *Identity Politics, General Elections, Public, Government*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan peristiwa politik yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk identitas politik. Identitas politik dapat mencakup beragam aspek, seperti identitas etnis, agama, gender, dan sosial. Pada dasarnya, identitas politik memainkan peran penting dalam membentuk preferensi pemilih, strategi kampanye, dan dinamika politik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dapat mengganggu ketahanan nasional dan kualitas demokrasi di Indonesia (I putu, Berlian, & Reda, 2021). Selain itu, identitas politik juga memengaruhi persepsi politik generasi milenial, yang merupakan bagian penting dari pemilih di Indonesia. Selain itu, risiko terhadap pluralisme politik identitas di Indonesia juga menjadi perhatian penting dalam konteks analisis politik identitas pemilu 2024. Status sosial, ekonomi, tempat tinggal, dan agama diyakini dapat mempengaruhi pilihan partai dan politik pemilih. Partai politik memilih kandidat, sehingga pemilih cenderung memilih partai politik atau kandidat sesuai dengan kesamaan identitas mereka.

Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa 'sama', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Puritanisme atau ajaran kemurnian atau ortodoksi juga berandil besar dalam memproduksi dan mendistribusikan ide 'kebaikan' terhadap anggota secara satu sisi, sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu. Politik identitas, menurut Abdillah (2002) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Politik identitas hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas; secara positif, politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaan aspirasi bagi yang tertindas. Fitur

dikotomi oposisional menjadi fondasi utama yang membedakan perasaan kolektivitas ke-kita-an terhadap yang lain. Tetapi kenyataannya, pada tataran individual pada era modernisasi yang serba mekanik, muncul 'kegagapan' untuk memahami struktur masyarakat yang plural, maka intoleransi semakin meningkat. Pendeknya, terjadi ketidaksesuaian imajinasi sosial tentang kehidupan sehari-hari

manusia modern dan interaksinya dengan masyarakat umum. Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia, terutama kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat sehingga sangat mudah untuk memenangkan simpati publik, memicu kemarahan dan sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis, agama dan kelompok tertentu. Pada akhir - akhir ini politik identitas muncul dalam banyak rupa mulai dari feminisme di eropa gerakan proletar di Amerika Latin, gerakan anti-apartheid di Afrika, pergolakan zionisme vis a vis pengakuan bangsa Palestina, gerakan summer spring di Timur Tengah, dorongan pemekaran wilayah berbasis etnis atau suku hingga gerakan separatisme di negara kita adalah wajah-wajah dari politik identitas. Begitu luasnya spektrum politik identitas, dari otoritarian hingga demokrasi, dari kesetaraan hingga keberpihakan, dari modern hingga kearifan lokal, dari negara bangsa hingga negara agama

Politik etnis juga mencakup politik identitas seperti isu harus memilih sesuai dengan suku, harus orang Jawa, orang Sumatra, harus orang Sulawesi dan seterusnya, hal tersebut termasuk bagian dari politik identitas yaitu primitivisme etnis. Isu politik identitas sengaja dan berulang kali dimunculkan oleh kelompok tertentu yang takut dirugikan. Ini adalah kebijakan saling perang melawan rakyat, yang kontraproduktif dan merusak semangat demokrasi. Politik selalu membutuhkan sarana dan wahana media untuk mengekspresikan diri melalui identitas seperti agama, suku, ras, kelompok, identitas budaya, ideologi, organisasi, dan komunitas adat lainnya (Muslih & Andre, 2023). Politik identitas dapat menimbulkan pola intoleransi, kekerasan verbal dan fisik, serta konflik etnis dalam kehidupan bermasyarakat (Paulus, Djoko, & Imanuel, 2021).

Dengan demikian, penulis akan melakukan analisis politik identitas terhadap pemilu kepada masyarakat yang ada di jalan sering kelurahan sidorejo, terkait pemahaman mendalam mengenai dampak politik identitas terhadap pemilu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian kualitatif, menurut Sugiono (2005) sebagaimana dikutip dalam (Salmaa 2023) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan, maka dari itu dapat diartikan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus kepada fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi di lingkungan sosial maupun perilaku manusia. landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu penelitian agar peneliti bisa fokus dengan penelitiannya sesuai fakta dan informasi nyata di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh tim peneliti yakni observasi secara langsung, wawancara dengan narasumber, Dokumentasi dan mencari sumber lain yang relevan dari internet untuk memperkuat hasil penelitian. Adapun Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang, yakni kepala desa, 2 Anggota masyarakat dan satu anak kost. Menanyakan terkait bagaimana Politik Identitas Terhadap Pemilu Di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian pendahuluan bahwa pemilihan umum merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin negara. Terdapat keyakinan bahwa pemilihan umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman karena didasarkan pada kehendak rakyat, sehingga sehingga sering dinyatakan bahwa pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum adalah penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi suatu rezim, sebagai pengakuan dan dukungan atas sahnya suatu kekuasaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat akan disampaikan, dan rakyat pemilih akan menilai para kontestan pemilu yang menawarkan visi, misi, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya. Sedemikian pentingnya pelaksanaan pemilu sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang telah disepakati bersama, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta harus diselenggarakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. (Harahap et al., 2021).

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (Pemilu), melalui Pemilu, masyarakat dapat ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan

negara atau daerah dalam periode tertentu. Fungsi utama pemilu adalah untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat sehingga pemilu merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. (Huda, 2018). Secara konseptual, negara hukum dan sistem demokrasi seyogyanya mengedepankan konsep pemenuhan kedaulatan rakyat sebagai unsur terpenting dalam demokrasi. Oleh karena itu, pemilu sejatinya hadir sebagai jembatan dalam mewujudkan marwah demokrasi pada konsep negara modern. Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan media bagi warga negara yang telah selaras dengan amanat konstitusi melalui pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam mengekspresikan kedaulatannya. Pemilu pun pada dasarnya merupakan langkah konstitusional dalam melengserkan pemegang kekuasaan negara secara periodik dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif. Secara yuridis, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah memiliki legal framework yang jelas. Dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menekankan bahwa pelaksanaan pemilu harus berada pada bingkai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Dengan kata lain, pelaksanaan pemilu sebagai media demokrasi memiliki rambu-rambu yang didasarkan asas LUBERJURDIL. Bukan tanpa sebab, hal ini bertujuan agar pelaksanaan pemilu tidak hanya berfokus pada kuantitas tetapi juga berfokus pada kualitas pemilu. Sehingga, dengan begitu pemilu yang berkualitas akan menjadi ejawantahan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, untuk menjaga pelaksanaan pemilu sesuai dengan asas LUBERJURDIL, maka dibentuklah lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, BAWASLU dan DKPP. Dimana, ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Terkhusus dalam penanganan pelanggaran pemilu, lembaga yang memiliki menangani hal tersebut ialah BAWASLU. Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut BAWASLU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Sebagaimana lembaga negara lainnya, BAWASLU juga diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam bidang tertentu yakni pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Wewenang BAWASLU secara *expressis verbis* diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu wewenangnya yakni menangani pelanggaran pemilu. (Alvian & Wiwin, 2022). Berdasarkan penjelasan dari pemilu di atas maka dapat dihubungkan juga bahwasanya politik identitas juga dapat mempengaruhi sistem pemilihan umum dikarenakan politik identitas ini merupakan ebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang

lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut dalam pemilihan umum. Yoga Sukmana (2019).

Peran Besar Politik Identitas dalam Pemilihan Umum

Berikut ini adalah beberapa peran utama politik identitas dalam pemilihan umum:

1. Mempengaruhi Preferensi Pemilih

Politik identitas mempengaruhi preferensi pemilih dengan mengaitkan identitas mereka dengan partai politik atau kandidat tertentu. Faktor seperti ras, agama, etnisitas, gender, dan orientasi seksual dapat menjadi dasar bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka.

2. Membentuk Aliansi dan Koalisi

Jenis politik ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan koalisi dan aliansi politik antara kelompok dengan identitas yang sama atau serupa. Kelompok-kelompok ini dapat bergabung dan bekerja sama untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum.

3. Mobilisasi Pemilih

Politik identitas sering digunakan untuk memobilisasi pemilih dengan mengaktifkan afiliasi dan loyalitas mereka terhadap identitas yang sama. Partai politik dan kandidat akan menargetkan kelompok-kelompok identitas tertentu untuk mendapatkan dukungan mereka dengan menyoroti isu-isu yang relevan bagi kelompok tersebut.

4. Memperkuat Solidaritas dan Identitas Kelompok

Politik identitas dapat memperkuat solidaritas dan identitas kelompok, membuat pemilih merasa terhubung dan mewakili nilai-nilai, kepentingan, atau aspirasi mereka. Hal ini dapat menciptakan rasa kohesi dalam kelompok identitas tertentu dan mendorong partisipasi politik mereka.

5. Mempengaruhi Agenda Politik

Politik identitas dapat mempengaruhi agenda politik dengan mendorong perhatian terhadap isu-isu yang relevan bagi kelompok identitas tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi prioritas kebijakan dan perdebatan publik seputar isu-isu tersebut.

Tanggapan Masyarakat Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung

Berdasarkan penelitian yang berjudul Analisis Politik identitas terhadap pemilu, peneliti melakukan observasi langsung ke masyarakat yang tinggal di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung. Pada penelitian ini peneliti meneliti 3 (tiga) responden

di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung. Peneliti bertemu langsung dengan masyarakat dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat. Masyarakat yang kami temui di kelurahan Sidorejo sangat antusias didalam memberikan tanggapan mengenai politik identitas selama berlangsungnya pemilu. Dari ketiga responden yang kami teliti mereka menyampaikan berbagai tanggapan mereka terhadap perilaku politik identitas dalam pemilihan umum. Misalnya terdapat salah satu warga yang kami temui yaitu bernama Bapak Boston Tambunan selaku ketua RT di Jalan Sering berpendapat jika politik identitas memang sering digunakan dalam ajang pemilu. Namun seharusnya calon pemimpin tidak boleh menggunakan identitas sebagai alat untuk mendudukkan dirinya di kursi kekuasaan, karena biar masyarakat yang menilai calon pemimpin nya tanpa harus menggunakan identitas dirinya supaya dapat dipilih. Dan terdapat juga salah satu seorang anak kost di tempat yang kami teliti memberikan pendapat kalau identitas boleh saja dipergunakan dalam ajang pemilihan umum dikarenakan itu sudah menjadi hal yang wajar jika dirinya ingin diberikan kepercayaan dan kesamaan suara sesuai dengan identitas dirinya dan hal tersebut justru menjadi nilai untuk dirinya agar bisa memenangkan pemilu tersebut. Dan ada juga satu responden yang kami teliti mengatakan bahwasannya pada saat Indonesia akan memasuki pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 mendatang. Salah satu kekhawatiran yang muncul menjelang pemilu adalah isu politik identitas responden yang kami teliti ini juga memberikan contoh kejadian politik identitas yang terjadi di Indonesia responden tersebut mengatakan berkaca dari pengalaman Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu, politik identitas dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan Pemilu 2024 karena berpotensi memecah preferensi politik di masyarakat atas dasar isu suku, agama, ras, dan antargolongan yang dibawanya seperti salah satu partai politik baru, yaitu Partai Ummat, bahkan sudah terang-terangan akan mengusung politik identitas dalam menghadapi Pemilu 2024. Isu-isu seperti ini mencederai implementasi demokrasi di negara kita karena bisa menghasilkan perbedaan politik yang tajam dan berujung pada kekerasan. Berdasarkan tanggapan-tanggapan dari responden yang kami teliti dari penelitian yang dilakukan di kelurahan Sidorejo, Medan Tembung ini , diketahui penelitian ini terdapat beragam pendapat dan analisis sendiri warga terkait dengan identitas politik pada masa pemilu yang berlangsung. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju , sehingga peneliti bisa mengetahui jika masyarakat di jalan sering sudah cukup paham terhadap politik identitas yang terjadi di pemilihan umum. Politik identitas di dalam pemilihan umum merujuk pada strategi politik yang menekankan dan

memanfaatkan perbedaan identitas sosial seperti suku , agama , gender, etnis yang tujuan dari politik identitas ini yaitu sebagai mobilitas untuk bisa mempengaruhi masyarakat dan menarik dukungan agar dapat dipilih dan menarik suara masyarakat. Media memiliki dampak dan peran dalam memperkuat politik identitas yakni dengan memfasilitasi komunikasi langsung antara calon kandidat dan pemilih sehingga bisa menjadi alat untuk kandidat untuk mempengaruhi dan menarik suara masyarakat politik identitas memiliki dampak yang signifikan dalam Pemilihan Umum pada dinamika politik dan pembentukan opini publik, Sementara itu dapat membangun solidaritas diantara kelompok tertentu sesuai tujuan dari kandidat akan dapat juga memperdalam perpecahan warga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan terkait "ANALISIS POLITIK IDENTITAS TERHADAP PEMILU (STUDI KASUS DIJALAN SERING, KELURAHAN SIDOREJO, MEDAN TEMBUNG)" bahwa warga Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung sudah paham akan politik identitas yang terjadi dalam pemilu, responden yang peneliti mintai tanggapan mengatakan bahwasannya politik identitas ini merupakan suatu hal yang menjadi hal yang sering didengar masyarakat di Jalan Sering beserta dengan para kandidat saat akan berlangsungnya pemilu. Dari ketiga responden yang kami teliti di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung mereka menyampaikan berbagai tanggapan yang berbeda terhadap perilaku politik identitas dalam pemilihan umum. Satu responden setuju dengan terjadinya perilaku politik identitas dikarenakan itu sudah menjadi hal yang wajar jika dirinya ingin diberikan kepercayaan dan kesamaan suara sesuai dengan identitas dirinya dan dua responden lagi mengatakan tidak setuju dikarekan berpotensi memecah preferensi politik di masyarakat atas dasar isu suku, agama, ras, dan antargolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- I putu, W. S., Berlian, H., & Reda, W. (2021). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*.
- Muhammad Irfan Dwitama, F. A. (2022). MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA 2020 TANGERANG SELATAN. *jurnal independen*, 58;60.

- Muhammad, H. (2022, September 30). Guru Besar UIN Palu ingatkan dampak politik identitas pecah persatuan. Retrieved November 22, 2023, from antaranews.com:
<https://sulteng.antaranews.com/berita/255409/guru-besar-uin-palu-ingatkan-dampak-politik-identitas-pecah-persatuan>
- Muslih, S., & Andre, P. P. (2023). Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang. *Jurnal Kelitbangan*, 225-238.
- Paulus, W. S., Djoko, A. P., & Imanuel, G. (2021). IDENTITY POLITICS AND PANCASILA-BASED RELIGIOUSITY IN THE PUBLIC SPHER. *GEMA TEOLOGIKA*, 95-126.
- Salmaa. 2023. "Metode Penelitian Kualitatif: Definisi, Jenis, Karakteristiknya." deepublish.
<https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Harahap, R. R. (2014). Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten. *fakultas ilmu akart, ilmu poltik*, 1-14.
- Huda, N., Suranto, Prasetyoningsih, N., Wijayanti, N. S., Sarnawa, B., Naserullah, & Lailam, T. (2019). *Mewujudkan daulat rakyat melalui pemilu yang berkualitas*. Yogyakarta: pusat kajian konstitusi dan pemerintahan.
- Sukmana, Y. (2019). *Politik Identitas Berlebihan Mengubah Mimbar Keagamaan Jadi Panggung Politik*.
- H. Soebagio. 2008. *Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia*. Makara: Sosial Humaniora, VOL. 12, NO. 2
- Abdillah. U. (2002). *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Indonesia Tera